



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57102, Telp. (0271) 717417 - 719483

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Drs. Atwal Arifin, Ak.

Nama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Institusi

Atas peran sertanya sebagai : **PEMAKALAH**

Dalam kegiatan **DISKUSI FAKULTAS** dengan judul :

*“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
se ex-Karesidenan Surakarta”*

Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS, tanggal 17 November 2012

Surakarta, 17 November 2012

Dekan

[Signature]
Dr. Eriyono, M.Si.



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA SE EX KARESIDENAN SURAKARTA

**Disampaikan pada Diskusi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Surakarta 17 Nopember 2012**

Pendahuluan

Eks Karesidenan Surakarta yang terdiri dari 6 Kabupaten dan satu Kota, merupakan daerah yang pada jaman sebelum kemerdekaan merupakan satu daerah kekuasaan yaitu kerajaan Surokarto yang letak ibukota kerajaanya di Kota Surakarta Menurut Residen Soerakarta 1920: A.J.W. Harloff , pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, wilayah keresidenan ini menjadi "Daerah Istimewa Surakarta", dengan gubernur Sri Susuhunan Pakubuwono XII dan wakil gubernur Sri Mangkunegoro VIII (bersamaan dengan berdirinya DI Yogyakarta). Pada masa kemerdekaan , daerah ini dibagi menjadi 7 kabupaten dan satu kotamadya., dan dalam pemerintahan jawatengah sebagai karesidenan .setelah karesidenan dihapus pasca revormasi th 1998 Karesidenan Surakarta, sebagaimana karesidenan lainnya di Indonesia, menjadi Daerah Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Surakarta.

Otonomi daerah ditandai adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah termasuk didalamnya pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2002). Menurut Smith (1985) dalam Halim (2001: 23) tujuan otonomi daerah dibedakan menjadi dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pusat, tujuan utamanya adalah pendidikan

politik,,pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah..

Adapun tujuan otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggungjawab sehingga sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban Pemerintah Pusat campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip *good governance* (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods dan services*). Prinsip-prinsip *good governance* antara lain adalah prinsip efektifitas (*effectiveness*), keadilan, (*equity*), Partisipasi (*participation*), Akuntabilitas (*accountability*) dan tranparansi (*transparency*). Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan penggunaan model manajemen pemerintahan yang baru yaitu *New Public Management* yang berfokus pada manajemen keuangan sektor publik yang berorientasi pada kinerja (Mardiasmo, 2002: 26).

Kinerja Pemerintah daerah sebatas kewewenangan yang yang menjadi tanggung jawabnya ,baik yang berurusan dengan urusan wajib maupun urusan pilihan yang diatur melalui perundang undangan sebagai konsekwensi dari otonomi daerah..

Sistem kewenangan pemerintahan dalam otonomi daerah diatur melalui pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 (telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yang terakhir UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah), meliputi, Desentralisasi, Dekonsentrasi Tugas pembantuan .

Desentralisasi menurut UU 32 /2004 ps 1 adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Cheema dan Rondinelli, dalam Wasisto, Sadu 2010, desentralisasi diartikan sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administrative dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit -unit administrative lokal, organisasi semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintahan lokal, atau organisasi nonpemerintah

Dekonsentrasi Menurut Peraturan Pemerintah nomor 7 th 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan ps 1 bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Tugas pembantuan (PP 07/2008 ps 1) adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau Kota dan desa serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada desa untuk

melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa

Pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Penggunaan paradigma *New Public Management* menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran tradisional (*traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*).

Kemampuan keuangan daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah mengalami perubahan dua kali terakhir Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah), menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang paling penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Otonomi daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah satu dengan lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, Suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah apabila memiliki kemampuan sebagai berikut (Nataluddin, 2001: 167) :

- 1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemampuan daerah dibidang keuangan dapat diketahui dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Menurut Noerdiawan (2006), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah Menurut Halim (2002: 245) ,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama periode tertentu (satu tahun) serta merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah di masa yang akan datang (Ekawarna, Sam, Rahayu, 2009).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 17 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

fungsi Anggaran yang merupakan instrumen kebijakan yang utama pemerintah daerah menurut Permendagri no.13 tahun 2006 ps. 16 APBD ,adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi otoritas yaitu merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi perencanaan yaitu merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan yaitu merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi alokasi yaitu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi distribusi yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6) Fungsi stabilisasi yaitu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

APBD harus disusun sedemikian rupa untuk dapat dioperasionalkan sesuai dengan fungsi fungsi diatas . Adapun Struktur ABPB terdiri dari Penerimaan Daerah dan Belanja Daerah . Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Adapun Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada psal 5 UU 33 th 2004 bersumber dari:

Pendapatan Asli Daerah PAD yang bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dana Perimbangan; Lain-lain Pendapatan.

Adapun Pembiayaan daerah bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
- b. penerimaan Pinjaman Daerah;
- c. Dana Cadangan Daerah; dan
- d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Penerimaan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (telah mengalami perubahan sebanyak dua kali terakhir Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) Pasal 1 ayat 48 bahwa penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah meliputi:

(1) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan (Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pasal 17 ayat 2).

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(2) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pasal 17 ayat 3). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 60 ayat 1 mencakup :

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA).

SILPA Mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban

kepada pihak ketiga samapi akhir tahun sebelum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(2) Pencairan dana cadangan

Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

(4) Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

(5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.

(6) Penerimaan piutang daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran Daerah

Pengeluaran Daerah terutama berkaitan dengan belanja, diatur kembali dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pasal 22 ayat 1 menyatakan belanja meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja terdiri dari Belanja tidak langsung dan Belanja langsung. Belanja tidak langsung Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Jenis-jenis anggaran

Berdasarkan aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran Operasional (*Current Budget*) digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun dan Anggaran Modal (*Capital Budget*) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas semua aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentative dan enacted (Noerdiawan, 2002: 50) : .. Anggaran Tentative (*Tentative Budget*) adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislative karena kemunculannya dipicu hal-hal yang tidak direncanakan.

Anggaran Enacted (*Enacted Budget*) adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

Laporan pertanggungjawaban APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menegaskan bahwa laporan yang harus disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD tidak hanya laporan keuangan tetapi juga laporan kinerja.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada DPRD yang terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan setidaknya meliputi :

- (1) Laporan Realisasi APBD
- (2) Neraca
- (3) Laporan Arus Kas
- (4) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan kinerja

Penyusunan laporan kinerja ini sangat relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang menggunakan pendekatan anggaran kinerja. Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja berarti untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus ditetapkan secara jelas dan terukur keluaran (*outputs*) yang ingin dicapai dan hasil (*outcomes*) yang jelas dan terukur untuk setiap program (Budi Mulyana, 2006: 214-215).

Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dan hasil (*outcome*) yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Program adalah penjabaran kebijakan pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga. Program terdiri dari satu atau lebih kegiatan. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau

Pengukuran kinerja

Sistem Pengukuran kinerja anggaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 37). Sedangkan kinerja anggaran adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan *unit cost* dari setiap kegiatan yang terstruktur (Ekawarna, Sam dan Rahayu, 2009).

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya kemampuan menunjukkan bagaimana uang

publik dibelanjakan, akan tetapi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja..

Berdasarkan PP 8 Tahun 2006, indikator kinerja yang digunakan adalah keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa. Keberhasilan suatu kegiatan diukur dengan *output*, sedangkan program diukur dengan *outcome*. *Output* adalah sesuatu yang diperoleh baik berupa barang atau jasa setelah dilaksanakannya suatu kegiatan, contoh kegiatan berupa pembangunan gedung sekolah, maka *output*nya berupa gedung sekolah. *Outcome* merupakan suatu keadaan yang mencerminkan berfungsinya *output*, contoh bila gedung sekolah yang baru saja dibangun benar-benar digunakan sebagai gedung sekolah sebagaimana diharapkan maka *outcome* dari program pembangunan sekolah tercapai (efektif).

Analisis rasio keuangan.

Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan yang digunakan sebagai konsep pengelolaan organisasi pemerintah untuk menjamin pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas. Analisis rasio keuangan adalah suatu proses yang mengidentifikasi ciri-ciri yang penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia

Menurut Halim (2002: 126) menyebutkan bahwa hasil analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk :

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh man aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Terdapat beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: (Ulum , 2009:30).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD
3. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)
4. Rasio Pertumbuhan

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dari dana ekstern. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak ekstern (terutama pihak pusat atau provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah, menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Rasio efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan Pendapatan Asli daerah dalam APBD. (Ulum M.D 2009:30) .Kemampuan kinerja anggaran pemerintah dikatakan efektif apabila angka rasio yang dicapai sebesar 1 (satu) atau 100%, namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD semakin baik.

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja anggaran pemerintah daerah.

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Pembangunan secara optimal. Rasio aktivitas menggambarkan total Belanja Pembangunan dibandingkan dengan total APBD. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan dalam menyediakan sarana dan prasarana, maka ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Pertumbuhan menunjukkan besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu period ke periode berikutnya.

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut

positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

Rasio pertumbuhan Belanja Operasi bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Rasio pertumbuhan Belanja Operasi menggambarkan realisasi Belanja Operasi tahun yang diteliti dikurangi dengan realisasi Belanja Operasi tahun sebelumnya dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun sebelumnya. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik

Rasio pertumbuhan belanja Modal bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Rasio pertumbuhan Belanja Modal menggambarkan realisasi Belanja Modal tahun yang diteliti dikurangi dengan realisasi Belanja Modal tahun sebelumnya dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun sebelumnya. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

Telaah Penelitian Sebelumnya

Heny Susantih,, dan Yulia Saftiana , yang meneliti Perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah propinsi se-sumatera bagian selatan kemandirian keuangan daerah, efektifitas, efisiensi, aktivitas dan perkembangan APBD tahun 2004-2007. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk melihat urutan peringkat evaluasi pelaksanaan laporan keuangan pemda propinsi Se-Sumbagsel. Hasil analisis kinerja keuangan daerah terhadap lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator kemandirian, efektifitas dan aktivitas keuangan daerah dapat diketahui bahwa Propinsi Lampung memiliki peringkat pertama dengan 63,81 persen, peringkat kedua yaitu Propinsi Jambi dengan nilai 62,22 persen, peringkat ketiga yaitu Propinsi Sumatera Selatan dengan 53,12 persen, peringkat keempat yaitu Propinsi Bangka-Belitung dengan 51,95 persen dan Propinsi Bengkulu memiliki peringkat terendah yaitu 49,22 persen. Tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Adapun uji beda yang dilakukan dengan metoda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Propinsi se-Sumatera bagian Selatan.

Samson (2001: 41) melakukan penelitian tentang indikator-indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Kuala tahun 1995/1996 –1999/2000. Indikator yang dimaksud adalah indikator kinerja efektifitas, efisiensi, rasio investasi (COR) dan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan hasil rata-rata sangat efektif yang ditunjukkan

dengan rasio efektifitas 104 persen dan sangat efisien yang ditunjukkan dengan rasio efisiensi 51 persen.

Simatupang (2007) melakukan penelitian mengenai evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan indikator efektifitas, efisiensi, perkembangan APBD dan kemampuan keuangan daerah, dengan hasil penelitian bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Selain itu juga digunakan uji beda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Selanjutnya berdasarkan *Mann-Whitney Test* secara statistik tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota, dan tidak terdapat perbedaan

Setiaji (2007) otonomi daerah juga termasuk didalamnya desentralisasi fiskal yang mengharapkan daerah mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi. Desentralisasi fiskal dilakukan dilakukan pada saat daerah mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa daerah dengan sumberdaya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan yang dimiliki (Bappenas).

Hidayat, Wahyu Pratomo Ario, D Agus Harjianto (2007), gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumberdaya keuangan untuk daerah tersebut agar dapat membangun daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari APBD .

Kerangka Pemikiran Teoriis

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan Kabupaten /kota Surakarta ,Klaten, Sukoharjo, Surakarta, Boyolali, Karanganyar yang secara historis administrative tergabung dalam karesidenan Surakarta pada tahun 2008-2010 dengan membandingkan indikator kinerja keuangan yang meliputi Rasio kemandirian daerah, efektifitas dan aktivitas keuangan daerah. Dari tiga indikator ini akan dilakukan pemeringkatan kinerja keuangan apakah semakin meningkat, menurun, stabil atau berfluktuasi dan membandingkan kinerja tahun 2008 -2010 dan membandingkan kinerja antar daerah .Untuk lebih memberikan kejelasan, berikut ditampilkan gambar perbandingan antar kab/Kota pada tahun 2008,2009,2010

Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif Komparatif . Menurut Whitney (dalam Nazir, 1985: 63-65) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungankegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, yang dilakukan dengan membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi serta penelitian terhadap fenomena-fenomena denganmenetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (normative survey).

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat dekripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki

Adapun kriteria pokok metode deskriptif adalah:

1). Kriteria umum:

1. Masalah yang dirumuskan harus patut, ada nilai ilmiah serta
2. Tidak terlalu luas.
3. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum.
4. Data yang digunakan harus fakta-fakta yang terpercaya dan bukan merupakan opini .
5. Standar yang digunakan untuk membuat perbandingan harus mempunyai validitas.

2). kriteria khusus

1. prinsip-prinsip ataupun data yang digunakan dinyatakan dalam nilai(value)
2. fakta-fakta ataupun prinsip-prinsip yang digunakan adalah mengenai masalah status.
3. Sifat penelitian adalah ex post facto,
karena itu tidak ada control terhadap variabel dan peneliti tidak mengadakan pengaturan atau manipulasi terhadap variable. variabel dilihat sebagaimana adanya.

Adapun langkah-langkah dalam metode deskriptif adalah:

1. Memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsepsi dan kegunaan masalah tersebut .
2. Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan
3. Memberi limitasi dari area atau scope atau wilayah penelitian akan dijangkau

4. Merumuskan kerangka teori atau kerangka konseptual
5. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan
6. Mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data yang cocok untuk penelitian.
7. Membuat tabulasi serta analisis
8. Memberikan interpretasi dari hasil dalam hubungannya dengan kondisi yang ingin diselidiki .

Metoda Analisisi adalah metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, membandingkan, menganalisis dan interpretasi data yang akhirnya pada kesimpulan yang didasarkan pada penelitian data. Hasilnya ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti (Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta) apabila ditinjau melalui analisis rasio keuangan APBD.dengan membuat pemeringkatan diantara Kabupaten/Kota yang diteliti

Data dan Sumber Data

Penelitian menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif dan merupakan data yang telah diolah oleh obyek yang diteliti. Sedangkan sumber data dari penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007,2008, 2009 dan 2010 yang dipublikasikan (www.djpk.depkeu.go.id/) dengan format menurut Permendagri no. 13 Tahun 2006. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria dan kebutuhan rumus dari masing-masing rasio yang

dikemukakan oleh Abdul Halim ,kemudian diolah secara manual dan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan membandingkan prestasi antar daerah.

3.6 Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Komparatif yang dilakukan terhadap Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta dilihat dari rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yang dikembangkan oleh Halim (2002: 128-135) meliputi :

1)Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim ,2002)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari pihak ekstern}}$$

Semakin tinggi rasio kemandirian daerah semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah, menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

2)Rasio Efektifitas dan Efisiensi

(1) Rasio Efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim ,2002) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungutPAD}}{\text{Realisasi PenerimaanPAD}}$$

Dari hasil analisis Rasio Efisiensi ini menunjukkan semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja anggaran pemerintah daerah.

(2).Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut(Halim ,2002) :

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan dalam menyediakan sarana dan prasarana, maka ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

(3), Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*).

.Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) terdiri dari :

a.Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio Pertumbuhan PAD dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut(Halim ,2002) :

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$$

Diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.

b.Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim ,2002):

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Operasi } X_{n-1}}$$

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik

c. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2002):

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}}$$

Keterangan :

X_n = Tahun yang dihitung.

X_{n-1} = Tahun sebelumnya.

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang

Adapun Variabel dalam Penelitian ini adalah :

1. Rasio Kemandirian
2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi
3. Rasio Aktifitas
4. Rasio Pertumbuhan

Hasil Penelitian

a. rasio kemandirian

rata rata rasio kemandirian pada tahun 2008 sebesar 8,6 dan meningkat 9,8 pada tahun 2009 dan naik menjadi 10,72 pada tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa struktur kemandirian Kab.Kota se Eks Karesidenan Surakartakin baik dan usaha

Pemerintah dalam meningkatkan PAD semakin , Hal yang menarik adalah bahwa Kota Surakarta selama tahun 2008,2009,2010 berada pada posisi paling mandiri jauh daiatas rata2 tahunan.selengkapnya digambarkan pada table dibawah ini

Tabel Tabel 1
Rasio Kemandirian
Kabupaten /Kota se Eks Karesidenan Surakarta
Tahun Anggaran 2008-2010

Kabupaten	Tahun Anggaran			Rata-rata
	2008	2009	2010	
Boyolali	8,06	9,25	11,37	9,56
Karanganyar	8,90	10,13	11,81	10,28
Klaten	5,98	6,94	8,21	7,04
Sragen	8,30	9,02	10,36	9,23
Sukoharjo	6,95	7,60	10,13	8,23
Wonogiri	5,83	8,22	8,66	7,57
(kota) Surakarta	13,83	13,81	14,50	14,05
Rata-rata eks- karesidenan Surakarta	8.26	9.28	10.72	9,42

Sumber: DJPK (Data diolah)

Rasio efisiensi PAD

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD adalah 5% dari potensi riil PAD.

Adapun hasil perhitungan Rasio Efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rasio Efisiensi
Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Surakarta
Tahun Anggaran 2008-2010

Kabupaten	Tahun Anggaran			Rata-rata
	2008	2009	2010	
Boyolali	3,99	4,12	2,39	3,50
Karanganyar	3,21	2,62	2,38	2,74
Klaten	2,70	2,75	2,44	2,63
Sragen	4,03	4,16	1,92	3,37
Sukoharjo	3,49	3,91	4,11	3,84
Wonogiri	2,96	3,03	3,18	3,06
(kota) Surakarta	4,26	4,09	4,18	4,18
Rata-rata	3,52	3,53	2,94	3,33

Sumber: DJPK (Data diolah)

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi diketahui bahwa pada Tahun 2008 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Sragen sebesar 4,03% yang berarti bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam mengumpulkan PAD sudah efisien karena biaya yang

digunakan untuk memungut PAD lebih rendah dibanding dengan PAD yang diperoleh.

Pada Tahun 2009 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama masih ditempati oleh Kabupaten Sragen sebesar 4,16%. Hal ini berarti bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sragen dalam upayanya mengumpulkan PAD sudah efisien.

Pada Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo sebesar 4,11%. Hal ini berarti kinerja keuangan Kabupaten Sukoharjo dalam upayanya mengumpulkan PAD sudah efisien. Dengan demikian, apabila dari tahun ke tahun Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta mengalami kenaikan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta dalam upayanya mengumpulkan PAD dari tahun ke tahun semakin efisien dalam penelitian ini terjadi di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

Rasio aktivitas

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Pembangunan secara optimal. Rasio aktivitas menggambarkan total Belanja Pembangunan dibandingkan dengan total APBD. Adapun hasil perhitungan Rasio Aktivitas dapat dilihat dari table 3 .

Tabel 3
Rasio Aktivitas
Kabupaten/Kota seEks Karesidenan Surakarta
Tahun Anggaran 2008-2010

Kabupaten	Tahun Anggaran			Rata-rata
	2008	2009	2010	
Boyolali	37,93	27,46	16,15	27,18
Karanganyar	32,62	30,22	20,29	27,71
Klaten	30,49	22,44	11,85	21,59
Sragen	35,09	32,98	24,66	30,91
Sukoharjo	35,42	23,78	26,30	28,50
Wonogiri	34,41	35,10	23,34	30,95
(Kota) Surakarta	52,00	45,45	33,44	32,48
Rata-rata	31,43	31,06	17,51	26,67

Dari hasil analisis dari tabel diatas ,dapat dibaca bahwa Rata rata Rasio aktivitas pada tahun 2008 di 7 Kabupaten/Kotase eks Karesidenan Surakarta sebesar 32,43 .Pada tahun 2009 Rata rata rasio Aktivitasnya 31,6 dan tahun 2020 sebesar 17,1. Artinya bahwa aktivitas pembangunan dalam 3 tahun di 7 Kabupaten paling laju pada tahun 2009 dan tahun berikutnya semakin menurun . Akan tetapi pada Kota

Surakarta selama tiga tahun itu rasio aktivitasnya diatas rata rata dan paling tinggi dan diatas rata rata baik tahunan maupun selama 3 tahun. Sebaliknya pada Kabupaten Klaten berada dibawah rata rata dan paling rendah. selama tiga tahun dan dibawah rata rata tahunan maupun rata rata tiga tahun .Artinya Kota Surakarta sangat mengoptimalkan dana APBD untuk pembangunan dan Kab Klaten dana APBD banyak diserap untuk kepentingan pembiayaan organisasinya.

Rasio Aktivitas Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta pada Tahun 2008 untuk urutan pertama ditempati oleh Kota Surakarta yaitu 52,00,Kabupaten Boyolali yaitu sebesar 37,93%.Rasio Aktivitas Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta .Pada Tahun 2009 untuk urutan pertama ditempati oleh Kota Surakarta sebesar 45,45 kemudian disusul Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 35,10%. Dan pada Tahun 2010 untuk urutan pertama ditempati oleh Kota Surakarta yaitu sebesar 17,51 disusul Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 26,30%.

Rasio pertumbuhan PAD

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.Adapun hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rasio Pertumbuhan PAD
Kabupaten/Kota seEks Karesidenan Surakarta
Tahun Anggaran 2008-2010

Kabupaten	Tahun Anggaran			Rata-rata
	2008	2009	2010	
Boyolali	24,50	21,08	22,87	22,82
Karanganyar	11,31	18,06	15,56	14,98
Klaten	25,90	15,24	20,65	20,60
Sragen	6,76	6,36	20,80	11,31
Sukoharjo	-1,57	16,89	31,95	15,76
Wonogiri	-2,82	46,75	61,36	35,10
(kota) Surakarta	10,07	12,33	12,57	11,66
Rata-rata	10,59	19,53	26,54	18,89

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2008 Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Klaten sebesar 25,90%. Tahun 2009 Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 46,75%. Tahun 2010 Rasio

Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo sebesar 31,95%.

Dari perhitungan tersebut untuk Kabupaten Sukoharjo Rasio Pertumbuhan PAD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan untuk Kabupaten yang lain kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun tidak stabil. Pertumbuhan ini disebabkan karena peningkatkan perolehan PAD yang ditunjukkan dengan kenaikan PAD dari sektor Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.

Rasio pertumbuhan belanja operasi

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Adapun hasil perhitungan, Adapun hasil analisis Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi
Kabupaten/Kota seEks Karesidenan Surakarta
Tahun Anggaran 2008-2010

Kabupaten	Tahun Anggaran			Rata-rata
	2008	2009	2010	
Boyolali	-3,46	-22,54	64,87	12,96
Karanganyar	6,79	-5,10	6,59	2,76
Klaten	29,58	-19,21	35,06	15,14
Sragen	2,60	4,78	44,09	17,16
Sukoharjo	5,48	21,33	-4,36	7,48
Wonogiri	10,66	13,52	13,30	12,49
(Kota) Surakarta	20,79	9,47	-0,52	9,91

Rata-rata	10,35	0,32	22,72	11,13
-----------	-------	------	-------	-------

Sumber: DJPK (Data diolah)

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Rasio Keuangan pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta selama tahun 2008 sampai 2010 maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil analisis Rasio Kemandirian di eks-Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Karanganyar sebesar 8,90%; 10,13%; 11,81%. Dalam hal ini, kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam membiayai kegiatan pemerintahannya termasuk dalam golongan instruktif. Ini disebabkan karena PAD yang dihasilkan masih sangat kecil bila dibanding dengan Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern. Pola hubungan instruktif ini dikarenakan Rasio Kemandirian yang dihasilkan masih diantara 0-25%. Pola hubungan instruktif tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Karanganyar tetapi juga di Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta. Hal ini mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari Pemerintah Pusat terutama berupa Dana Alokasi Umum.

2) Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota eks-Karesidenan Surakarta sudah berjalan Efisien. Hasil analisis Rasio Efisiensi diketahui bahwa pada Tahun 2008 dan 2009 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Sragen sebesar 4,03% dan 4,16%. Pada Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo sebesar 4,11%. Dengan demikian, apabila dari tahun ke tahun Rasio Efisiensi Kab⁶⁷ Kota se-Eks Karesidenan Surakarta mengalami kenaikan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta dalam upayanya mengumpulkan PAD dari tahun ke tahun semakin efisien dalam penelitian ini terjadi di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

3) Rasio Aktivitas

Dari hasil analisis , diketahui bahwa Rasio Aktivitas Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta pada Tahun 2008 untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Boyolali yaitu sebesar 37,93% dan pada Tahun 2009 untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 35,10%. Sedangkan pada Tahun 2010 untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 26,30%. Rasio Aktivitas Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta dari tahun 2008-2010 semakin menurun. Hal ini berarti pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta semakin menurun dari tahun ke tahun. .

4) Rasio pertumbuhan

(1) Rasio Pertumbuhan PAD

Dari, hasil analisis , dapat diketahui bahwa pada Tahun 2008 Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Klaten sebesar 25,90% dan Tahun 2009 urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 46,75%. Sedangkan Tahun 2010 urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo sebesar 31,95%.

Dari perhitungan tersebut untuk Kabupaten Sukoharjo Rasio Pertumbuhan PAD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan untuk Kabupaten yang lain kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun tidak stabil. Pertumbuhan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam meningkatkan perolehan PAD yang ditunjukkan dengan kenaikan PAD dari sektor Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.

(2) Rasio pertumbuhan belanja operasi

Dari hasil analisis , dapat diketahui Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2008 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Klaten sebesar 29,58% dan Tahun 2009 urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo sebesar 21,33%. Sedangkan Tahun 2010 untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Boyolali sebesar 64,87%. Dari Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta dilihat dari Rasio Pertumbuhan Belanja Operasinya yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu Kabupaten Sragen. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh naiknya Belanja Aparatur Publik dan Belanja Aparatur Daerah.

(3) Rasio pertumbuhan belanja modal

Dari hasil analisis ,dapat diketahui Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2008 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 33,68% dan Tahun 2009 urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Boyolali sebesar 4,23%. Sedangkan Tahun 2010 urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo sebesar 13,53%.

Dari Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Surakarta untuk Rasio Pertumbuhan Belanja Modal yang mengalami kenaikan dari tahun dialami oleh Kabupaten Sukoharjo. Rasio pertumbuhan yang cenderung naik dari tahun ke tahun menandakan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dan profesionalitas Kabupaten Sukoharjo dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal itu dapat dicapai dengan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu ditingkatkan.